



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)**

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Tahun Sidang     | : 2019 - 2020  |
| Masa Persidangan | : IV   |
| Rapat            | : Ke - 2 (Dua)   |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pendapat  |
| Dengan           | : Direktur Utama PT PLN (Persero)  |
| Hari, tanggal    | : Rabu, 17 Juni 2020   |
| Sifat Rapat      | : Terbuka  |
| Waktu            | : Pukul 10.00 WIB s.d 16.30 WIB  |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I,<br>secara tatap muka dan <i>virtual</i>   |
| Acara            | : 1. Penjelasan terkait isu kenaikan tarif listrik<br>2. Evaluasi pembangkit eksisting dan tertunda pada program 35.000 MW<br>3. Kendala dan tantangan pembangunan transmisi dan distribusi<br>4. Lain lain.         |
| Ketua Rapat      | : H. Eddy Soeparno, SH, MH<br>(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)   |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Nanik Herry Murti   |
| Hadir Anggota    | : 41 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI<br>terdiri dari:<br>10 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik<br>31 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual<br>10 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin |

## KESIMPULAN RAPAT

### I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 17 Juni 2020 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Intern Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Penjelasan terkait isu kenaikan tarif listrik
  - b. Evaluasi pembangkit eksisting dan tertunda pada program 35.000 MW
  - c. Kendala dan tantangan pembangunan transmisi dan distribusi
  - d. Lain lain.
3. Ketua Rapat menyampaikan pemaparan terkait agenda rapat dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) antara lain:
  - a. Selama masa pandemic Covid-19, khususnya pada awal Juni ini, banyak masyarakat yang mengaku mengalami lonjakan tagihan listrik dan bahkan ada yang mengalami lonjakan melebihi 100%. Lonjakan tagihan listrik ini memunculkan pertanyaan tentang keterbukaan dan kemampuan PT PLN (Persero) dalam mensosialisasikan kebijakan perusahaan. Maka dari itu Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan yang mendetail dan komprehensif mengenai lonjakan tagihan listrik yang dialami oleh sebagian masyarakat tersebut.
  - b. Kemudian, Komisi VII DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan yang mendetail dan komprehensif terkait evaluasi pembangkit eksisting dan tertunda pada program 35.000 MW sebelum dan setelah adanya Covid-19 serta kendala dan tantangan yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam membangun transmisi dan distribusi.
4. Penjelasan Direktur Utama PT PLN (Persero)
  - a. Penjelasan Terkait Isu Kenaikan Tarif Listrik
    - 1) Tarif Listrik sejak Januari 2017 tidak pernah naik,
    - 2) Adanya PSBB dan protokol physical distancing membuat sebagian besar petugas PLN tidak dapat mengunjungi pelanggan untuk melakukan pencatatan meter pelanggan.

- 3) Tagihan listrik April dan Mei didasarkan pada perhitungan rata-rata penggunaan listrik 3 bulan terakhir (Januari, Februari, dan Maret).
- 4) Untuk rekening Juni, sebagian besar petugas sudah melakukan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan.
- 5) Pemakaian bulan Maret dan April (Rekening April dan Mei) terjadi kenaikan konsumsi listrik akibat banyaknya aktivitas pelanggan di rumah, sehingga terjadi perbedaan realisasi konsumsi dengan penagihan menggunakan rata-rata 3 bulan (sebagian besar realisasi lebih besar daripada yang ditagihkan). Selisih tersebut kemudian ditagihkan pada rekening Juni saat PLN telah melakukan pencatatan riil, baik melalui petugas catat meter ataupun laporan mandiri pelanggan melalui WA.

b. Evaluasi 35.000 MW

- 1) Pada tahun 2015 - 2019, PLN telah membangun pembangkit 14.793 MW, transmisi 20.727 kms, dan gardu induk 74.327 MVA dari program 35 GW yang dicanangkan oleh pemerintah, pembangunan selanjutnya akan menyesuaikan dengan kondisi demand dan supply.
- 2) PLN harus melaksanakan agresif penjualan dan mengejar pelanggan besar khususnya di sistem Jawa-Bali dan Sumatera (85%) untuk mengurangi resiko over supply, sehingga PLN membutuhkan dukungan stakeholder antara lain Kementerian BUMN, BKPM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM.
- 3) Sesuai RUPTL 2019-2028, tambahan 35+7 GW dijadwalkan selesai tahun 2023. Untuk RUPTL 2020-2029 sedang dievaluasi dengan mempertimbangkan supply dan demand terutama dengan adanya Covid-19

c. Kendala dan Tantangan Pembangunan Transmisi dan Distribusi

- 1) Untuk transmisi, kendala dan tantangannya adalah pembebasan lahan untuk jalur transmisi karena masuk Kawasan Hutan lindung, dan permasalahan sosial lainnya terkait resistansi masyarakat dalam pembangunan SUTT/SUTET. Selain itu adalah faktor kesediaan material, kontraktor dan demand industri yang tidak sesuai proyeksi.

- 2) Untuk Distribusi, kendalanya adalah lokasi geografis dan akses yang sulit terutama daerah Indonesia Timur. Selain itu, Beban yang tersebar tidak merata, sehingga ada potensi losses pada jaringan distribusi yang akan mempengaruhi kualitas dan keandalan sistem

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk lebih proaktif dan komunikatif dalam menyampaikan penjelasan kepada masyarakat bahwa:
  - a. Tidak ada kenaikan tarif dasar listrik selama pandemi Covid-19
  - b. Formula potongan 100% bagi pelanggan 450 VA dan potongan 50% bagi pelanggan 900 VA subsidi
  - c. Sosialisasi yang berkaitan dengan relaksasi yang diberikan kepada pelanggan yang terdampak oleh kenaikan tagihan listrik diatas 20% melalui saluran media massa (cetak dan elektronik) dan media sosial serta memberikan solusi secepatnya untuk meredam polemik di masyarakat.
2. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk memberikan laporan terkait mekanisme perhitungan tagihan listrik secara mendetail dan komprehensif dan disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI.
3. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan perencanaan kebutuhan listrik secara cepat dan tepat serta melakukan langkah-langkah strategis agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan pasokan listrik.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyiapkan laporan terkait kejelasan status pembangkit-pembangkit listrik yang tengah dalam tahap konstruksi yaitu: terkait tanggal awal dimulai proyek, status saat ini, rencana dan target penyelesaiannya termasuk khususnya di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) dan Kawasan Ekonomi Khusus melalui Panja Listrik Komisi VII DPR RI.

6. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk membuka peluang investasi dan memprioritaskan energi baru terbarukan, termasuk proyek-proyek yang belum berjalan.
7. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait dalam mengatasi kendala-kendala terkait pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik, seperti pembebasan lahan dan jalur transmisi untuk masuk kawasan hutan lindung, pemukiman penduduk, dan perkebunan masyarakat.
8. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 24 Juni 2020.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 16.30 WIB

Jakarta, 17 Juni 2020

**DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)**

**KETUA RAPAT,**

**Ir. ZULKIFLI ZAINI, MBA**

**H. EDDY SOEPARNO, SH, MH**  
**A-496**